BAB II
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Banten

1. Sejarah Berdirinya Provinsi Banten

Banten sebagai nama suatu wilayah sudah dikenal dan diperkenalkan sejak abad ke 14. Mula-mula Banten merupakan pelabuhan yang sangat ramai disinggahi kapal dan dikunjungi pedagang dari berbagai wilayah hingga orang Eropa yang kemudian menjajah bangsa ini. Pada tahun 1330 orang sudah mengenal sebuah negara yang saat itu disebut Panten, yang kemudian wilayah ini dikuasai oleh Majapahit di bawah Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk. Pada masa-masa itu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Demak merupakan dua kekuatan terbesar di Nusantara. Tahun 1524 - 1525 para pedagang Islam berdatangan ke Banten dan saat itulah dimulai penyebaran agama Islam di Banten. Sekitar dua abad kemudian berdiri Kadipaten Banten di Surasowan pada 8 Oktober 1526. Pada tahun 1552 - 1570 Maulana Hasanudin Panembahan Surosowan menjadi Sultan Banten pertama. Sejak itu dimulailah pemerintahan kesultanan di Banten yang diakhiri oleh Sultan Muhammad Rafl'uddin (1813 - 1820) merupakan sultan ke dua puluh setelah sultan dan rakyat masa sebelumnya berperang melawan penjajah. Namun demikian perjuangan rakyat Banten terns berlanjut hingga detik terakhir kaki penjajah berada di bumi Banten.

Setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, Banten memisahkan diri dari Jawa Barat dan membentuk sebuah pemerkaran Provinsi baru yaitu Provinsi Banten. Pada tahun 1963 Pemerintahan Provisi Banten mulai di

bentuk yaitu dengan nama Panitia Provinsi Banten yang dilakukan di Pendopo Kabupaten Serang. Selama tiga tahun berjuang seupaya Provinsi banten belum dapat terbentuk akhirnya memalui Sidang Pleno yang di laksanakan pada tanggal 25 Oktober 1970 Presidum Panitia Pusat Provinsi Banten disahkan. Akan tetapi perjuangan untuk membentuk Provini Banten tidak berhenti di situ di karenakan pada masa Orde Baru pembentukan provinsi baru belum di juga di realisasikan. Di era Reformasi masyarakat juga masih memperjuangkan agar banten bisa membentuk provinsi sendiri dan akhirnya perjuangan tersebut membuahkan hasil pada tahun 2000. Pada tanggal 18 Juli 1999 melalui Deklarasi Rakyat Banten di Alun Alun Serang, Badan Komite Provinsi Banten mulai menyusun rencana kerja dan pedoman dasar. Sejak itu pembanetukan pemerintahan di Provinsi Banten mulai terlihat lebih jelas dimana Sub – Sub Komite mulai terbentuk di berbagai penjuru wilayah Banten untuk memperkuat dorongan guna terbentuknya Provinsi Banten. Setelah perjuangan yang sangat panjang pada tanggal 4 Oktober 2000 melalui rapat paripurna DPR RI mengesahkan Rencana Undang Undang terkait dengan pemekaran provinsi yang di atur dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2000 mengenai pembentukan Provinsi Banten. Dan Provinsi Banten sendiri di resmikan pada tanggal 18 November tahun 2000 dan sekaligus dilakukan pelantikan Pejabat Gubernur yang saat itu di jabat oleh H. Hakmaludin Djamal untuk menjalankan perintahan sementara sebelum pemilihan gubernur yang tetap. Dan akhirnya pada tahun 2002 Dr. Ir. H. Djoko Munandar di pilih sebagai gubernr Banten oleh DPRD dan Hj. Atut Chosiyah, SE sebagi wakilnya. (Dokumentasi, Dinas Kebudayaan dan Provinsi Banten)

2. Kondisi Geografis Provinsi Banten

Provinsi banten merupakan salah satu Provinsi yang ada di indonesia yang merupakan provinsi dari hasil pemekaran wilayah diaman dahulu banten merupakan bagian dari provinsi Jawa Barat yang di tetapkan dalam Undang Undang No. 23 tahun 2000. Saat ini Provinsi Banten terdiri dari empat kota dan empat kabupaten yaitu Kota Serang, Kota Tanggerang Selatan, Kota Cilegon, Kota Tanggerang dan Kabupaten Tanggerang, Kabupaten lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang.

Jika dilihat secara geografis Provinsi Banten memiliki luas 9.662.92 km2 atau sekitar 5,51% dari keseluruhan luas wilayah Negara Indonesia. Provinsi Banten sendiri terletak di bagian ujung barat Pulau Jawa dengan jarak sekitar 90 Km dari Derah Ibu Kota Jakarta

Batas wilayah Provinsi Banten :

1. Bagian timur

   Bagian timur Provinsi Banten berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

2. Bagian utara

   Bagian utara Provinsi Banten berbatasan langsung dengan Laut Jawa

3. Bagian selatan

   Bagian selatan Provinsi Banten berbatsan langsung dengan Samudera Hindia.

4. Bagian barat

   Bagian barat Provinsi Banten berbatasan langsung dengan Selat Sunda.

Letak Provinsi banten sendiri dapat di bilang sangat strategis karena berasa

di jalur penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Secara Astronomis Provinsi Banten terletak pada 507'50" – 701'1" garis Lintang Selatan dan 10501'11" – 10607'12" Bujur Timur.

Tabel 2.1
Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Kabupaten/ Kota Regency/Municipality	**Ibu Kota Capital City**	**Luas/ Areal) (km^2)**	**Persentase Terhadap Luas Provinsi Banten Percentage to Area of Banten province (%)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Kabupaten / Regency			
1. Pandeglang	Pandeglang	2 746,89	28,43
2. Lebak	Rangkasbitung	3 426,56	35,46
3. Tangerang	Tigaraksa	1 011,86	10,47
4. Serang	Ciruas	1 734,28	17,95
Kota / Municipality			
5. Tangerang	Tangerang	153,93	1,59
6. Cilegon	Purwakarta	177,50	1,82
7. Serang	Serang	266,71	2,76
8. Tangerang Selatan	Pamulang	147,19	1,52
Provinsi Banten	**Kota Serang**	**9 662,92**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten

Tabel dan grafik tersebut diatas menunjukan bahwa pandeglang adalah kabupaten terluas di bandingkan kabupaten yang lain sedangkan tangerang tampak sebagai kabupaten terkecil, tetapi dalam hal kesibukan perkotaan serang adalah yang paling majemuk sebagai ibukota Provinsi Banten.

Tabel.2.2 Jarak Antar Kota di Provinsi Banten dan Sekitarnya (Km)
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jarak antara kota yang ada di Provinsi Banten berbeda-beda dan memiliki waktu tempuh serta kondisi infrastruktur jalan yang beragam.

Kota	**Jakarta**	**Pandeglang**	**Rangkas bitung**	**Tangerang**	**Ciruas**	**Serang**	**Cilegon**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Jakarta	-	111	131	25	81	90	110
Pandeglang	111	-	20	86	30	21	41
Rangkasbitung	131	20	-	106	50	41	61
Tangerang	25	86	106	-	56	65	85
Ciruas	81	30	50	56	-	9	29
Serang	90	21	41	65	9	-	20
Cilegon	110	41	61	85	29	20	-

Tabel 2.3
Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Kabupaten/ Kota ***Regency/Municipality***	**Kecamatan** **District**	**Desa** **Villages**	**Kelurahan** **Special Vilages**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Kabupaten / Regency			
1. Pandeglang	35	326	13
2. Lebak	28	340	5
3. Tangerang	29	246	28
4. Serang	29	326	-
Kota / Municipality			
5. Tangerang	13	-	104
6. Cilegon	8	-	43
7. Serang	6	-	66
8. Tangerang selatan	7	-	54
Provinsi Banten	**155**	**1 238**	**313**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten

Dari tabel di atas menunjukan bahwa Kabupaten Pandeglang adalah Kabupaten yang memiliki jumlah kecamatan terbanyak dibandingkan kabupaten lain. Sedangkan Kabupaten lebak memiliki jumlah desa terbanyak dan kelurahan terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Tangerang. Untuk perkotaan tangerang memiliki jumlah kelurahan terbanyak terbanyak dibandingkan kota yang lain yang ada di Provinsi Banten

3. Kondisi Demografi Provinsi Banten

Jumlah penduduk basil registrasi (catatan administrasi penduduk) di Provinsi Banten. Jumlah kepadatan penduduk beserta pertumbuhan penduduk pada tahun 2013 dan

tahun 2014. Pada label dibawah ini menunjukkan jumlah dan kepadatan penduduk di Provinsi Banten pada tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.4

Distribusi Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2013-2014

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provensi Banten

Kabupaten/ Kota ***Regency/Municipality***	**Presentase Penduduk Percentage of Population**		**Rasio Seks Sex Ratio**		**Kepadatan Penduduk Per km2 Population Density per sq.km**	
	2013	**2014**	**2013**	**2014**		
2013	**2014**					
Kabupaten / Regency						
1. Pandeglang	10,33	10.15	104,53	104.51	431	433
2. Lebak	10,90	10.76	105,28	105.23	364	368
3. Tangerang	27,57	27.89	104,96	104.90	3 121	3 227
4. Serang	12,67	12.50	103,04	102.98	837	844
Kota / Municipality						
5. Tangerang	17,05	17.09	104,44	104.36	12 684	12 992
6. Cilegon	3,48	3.46	104,47	104.39	2 270	2 309
7. Serang	5,40	5.39	105,38	105.30	2 320	2 366
8. Tangerang selatan	12,60	12.76	101,71	101.65	9 806	10 143
Provinsi Banten	**155**		**1 238**		**313**	

4. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Banten

a) Visi

"Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa"

b) Misi

1) Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah mendukung pengembangan wilayah dan kawasan berwawasan lingkungan.
2) Pemantapan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan manusia.
3) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang religius, cerdas dan berdaya saing dalam kerangka penguatan NKRI.
4) Penguatan semangat kebersamaan antar pelaku pembangunan dan sinergitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang selaras, serasi dan seimbang
5) Peningkatan mutu kinerja pemerintah daerah yang berwibabwa menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

5. **Gambaran Umum Kebudayaan dan Pariwisata di Provinsi Banten** Dasar pembentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten:

   Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten No 3 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Provinsi Banten serta Peraturan Gubemur No 14 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

6. **Tugas Pokok dan Fungsi Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten**

   Berdasarkan (Bantenculturetourism.com, 2019) maka dapat dimbil informasi terkait dengan Tugas Pokok berserta fungsi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwista Provinsi Banten

a) Tugas Pokok

Tugas pokok dari dinas ini adalah menjalankan urusan pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada Asas Otonomi Derah beserta tugas pembangunan dalam Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

b) Fungsi

Penyusunan rencara strategi dinas dengan berdasarkan pada rencana strategis pemerintah daerah, Pengurusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan rencana strategis dinas pelaksanaan koordinas kegiatan dinas pembinaan dan penyelanggaraan serta koordinasi di bidang kebudayaan daerah, Pembinaan dan penyelengaraan pemeiharaan serta koordinasi bidang semberdaya manusia kebudayaan dan pariwisata, Pembinaan dan pengembangan serta koordinasi bidang destinasi pariwisata, Pembinaan dan penyelengaraan serta koordinasi bidang pemsaran produk kebudayaan dan pariwisata, Peminaan dan penyelengaraan administrasi ketatausahaan, Pembinaaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, dalam Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pelaksanaan tugas lain selain tugas dan fungsinya

7. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

a) Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten memiliki peran diantara nya yaitu mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Banen khususnya dalam lingkup kebudayaan dan pariwisata. Dengan adanya upaya tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten menyusun visi dengan tetap berlandaskan pada kedudukan, tugas serta fungsi nya. Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten kemudian menetapkan visi untuk tahun 2012 – 2017 yaitu sebagai berikut :

"Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten yang Berdaya Saing Berkelanjutan"

b) Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwista Provinsi Banten

Dinas Kebudayaan dan Pariwista Provinsi Banten menetapkan misi yang berisikan strategi dalam setiap point nya, berikut merupakan misi yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk tahun 2012 – 2017 :

1. **Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya.**

   Point Ini bertujuan untuk :

   Meningkatkan kualitas terhadaap beberapa point yakni perlindungan, pengembangandan pemanfaatan bidang kesenian sekaligus meningkatkan kelestarian warisan budaya

2. **Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing.**

   Point ini bertujuan untuk :

   Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing tinggi dan meningkatkan kualitas usaha pariwisata yang berbasis pada **ekonomi kreatif**.

3. **Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan yang berbasis kebudayaan dan pariwisata yang profesional.**

   Point ini bertujuan untuk :

   Meningkatkan kemitraan dan kerjasama untuk meningkatkan penguatan kelembagaan, meningkatkan daya saing dalam segi sumber daya manusia.

4. **Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata.**

Point ini bertujuan untuk :

Memberluasa jejaring pemsaran atau promosi kebudayaan dan pariwisata

5. **Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten**

   Point ini bertujuan untuk :

   Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah internal Dinas Kebudayaan dan Pariwista Provinsi Banten sangat lah berpengaruh terhadap kualitas SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, guna mendukung terwujudnya program yang sudah di rencanakan, ketepatan realisasi anggaran hingga evaluasi serta adanya pelaporan yang sesuai dengan standar operasional yang berlaku dan juga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai acuanya. Dengan terpenuhinya tugas pokok berserta fungsi diharapakan pula ketersediaan data dan juga informasi terkait dengan pembangunan pariwisata dan data yang dapat di pertanggungjawabkan.

8. **Tugas, Fungsi serta Strukur Organisasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten**

Berdasarkan pada ditetapkannya (Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007) mengenai organisasi perangat daerah maka Dinas Kebudayaan dan Pariwista Provinsi Banten yang di bentuk pada tahun 2002 dan di atur dalam (Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 24 Tahun 2002), mengalami perombakan organisasi pada tahun 2008 yang di atur dalam Peraturan Derah Provinsi Banten Kedudukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata No. 3 Tahun 2008, kemudian perubahan terkahir di lakukan pada tahun 2012 yang di atur dalam Peraturan Derah Provinsi Banten No. 3 Tahun 2012. Pada berubahan terakhir

kedudukan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten bekerja sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam bidang kebudayaan dan pariwista. Menurut peraturan Gubernur Povinsi Banten mengenai uraian tugas dan tata kerja Dinas Derah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten mempunyai suatu tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintah daearah dengan tetap berdasar pada asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di ruang lingkupnya yaitu dalam bidang kebudayaan dan pariwista.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dala menjalankan tugas pokoknya juga memiliki beberapa **fungsi** diantaranya sebagai penyusun rencana strategis dinas dengan berdaskan pada rencana di atasnya yakni rencana strategi pemerintah daerah, merumuskan kebijakan yang sifatnya teknis di dalam bidang keudayaan dan pariwisata sesuai dengan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, melaksanakan koordinasi serta kegiatan dinas, melakukan pemidnaan dan menyelenggarakan serta melakukan koordinasi di bidang kebudayaan Daerah Banten, membina kemudian menyelenggarakan, memelihara dan juga mengkoordinir dalam bidang yang menjadi ruang lungkup nya yakni dalam bidang SDM dalam lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, membina sekaligus menyelenggarakan kemudian mengkoordinir khususnya dalam bidang promosi dalam memasarkan produk yang berkaitan dengan Kebudayaan dan Pariwisata, membina serta menyelenggarakan brtbagai keebutuhan seperti administrasi dalam segi ketata usahaan, kemudian membina salah satu unit organisasi yakni (Unit Pelaksana

Teknis) atau yang sering di singkat UPT dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, serta melaksanakan tugas tugas yang lainnya yang sesuai dengan tugas pokok dan juga fungsinya (Bantenculturetourism.com, 2019).

Dalam menjalankan fungsinya, kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten memiliki beberapa tugas, diantaranya melakukukan penyusunan rencana terkait dengan orientasi strategis dinas, menyusun rencana terkait dengan pekerjaan kedinasan, kemudian melakukan perencanaan, mengorganisir dan kemudian melaksanakan atau merealisasikannya sebelum melakukan evauasi terkait dengan program dan kegiatan yang sebelumya telah di susun, kemudian menjadi pimpinan, melakukan pembinaan dan kemudian mengkoordinir sekaligus menjadi penyelenggara dalam kegiatan dalam bidang kebudayaan daerah, Sumber Daya Manusia dalam segi kebudayaan serta pariwisata, mengembangkan potensi dari pariwisata, dan melakukan pemasaran dari sektor kebudayaan dan pariwisata, mengkoordinir kegiatan kegiatan dinas dengan unit unit kerja terkait, mengawasi dan melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan dinas, serta mengkoordinasi, melakukan integrasi dan koordinasi sekaligus simplifikasi dalam menjalankan tugas (Bantenculturetourism.com, 2019).

1) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, memimpin beberapa jabatan yang di dalam (Bantenculturetourism.com, 2019) yakni :
    a) Sekertaris
    b) Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Derah Provinsi Banten
    c) Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
    d) Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

e) Kepala Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata

f) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

g) Jabatan Fungsional lainnya

B. Sekertaris

Sekertaris di pimpin oleh seorang yang di sebut sekertaris yang memiliki tugas untuk menjadi seorang pembantu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten terkait dengan pelaksanaan perumusan kegiatan ataupun program, kemudian mengkoordinir serta memonitoring urusan administrasi baik dalam segi umum ataupun kepegawaian dan juga segi keuangan berserta perencanaan evaluasi kerja dan pelaporan.

Dalam melaksankan tugas pokoknya sekertaris juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya membuat rencana program dan juga kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya, merumuskan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan juga pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi berserta pelaporan, merumuskan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian serta keuangan dan juga evaluasi dan pelaporan, melaksankan evaluasi, supervisi serta pelporan kebijakan standarisasi program administrasi umum, kepegawaian dan juga keuangan serta melakukan evaluasi dan pelaporan, mempersiapkan data beserta bahan untuk urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan, serta melakukan evaluasi dan pelaporan, melaksankan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya (Bantenculturetourism.com, 2019).

Dalam melaksanakan fungsinya, sekertaris memiliki beberapa tugas

diantaranya melakukan penyusunan rencana kerja yang terkait dengan kesekertariatan dinas, mempersiapkan bahan nahan guna membuat kebijakan, pedoman, standarisasi, serta dalam service atau pelayanan dalam hal adiministrasi umum, keegawaian dan keuangan, serta melakukan evaluasi dan pelaporan, mempersiapkan bahan pembinaan dan pengembangan adiministrasi umum, kepegawaia, keuangan, serta melakukan evaluasi dan pelaporanenyiapkan bahan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta melakukan evaluasi dan pelaporan, mempersiapkan bahan program beserta kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta melakukan evaluasi dan pelaporan, mempersiapakan bahan untuk kegiatan kesekertariatan, perlengakapan, Kerumahtanggaan, perpustaka, kehumasan dan penyusunan program, mempersiapkan bahan unuk kegiatan pengelolaan keuangan, mempersiapkan bahan untuk adiministrasi kepegawaian dinas, melaksakan koordinasi, integrasi, singkronisasi dan juga simlikasi dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya (Bantenculturetourism.com, 2019).

1) Sekertaris membawahi
   a) Sub – Bagian Umum dan Kepegawaian
   b) Sub – Bagian Keuangan
   c) Sub – Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

1. Sub – Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub – Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok yaitu membantu sekertaris dalam mempersiapakan administrasi seperti surat menyurat, kearsipam, perlengkapan, rumah tangga, administrasi

kepegawaian, kehumasan, inventaris barang dan juga asset sekaligus dalam kepustakaan.

Dalam melaksankan tugas pokoknya Kepala Sub – Bagian Umum dan kepegawaian mendapatkan beberapa tugas anatara lain adalah membuat rancangan rencana kerja untuk Sub – Bagian, menjalankan urusan rumah tangga dinas, melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kearsipan dan pengelola pustaka, melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang dinas, melakukan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan juga keamanan kantor serta lingkungan, melaksanqaakan fungsi kehumasan.

2. Sub – bagian Keuangan

Sub – Bagian Keuangan meruapakn salah satu posisi yang sangat penting yang memiliki tugas pokok untuk membantu seorang sekertaris dalam menjalakan tugasnya yakni dimulai daari mempersiapkan bahan guna melakukan proses perancangan anggran, melakukan rekap atau pembukuan, dan verivikasi terkait dengan perbendaharaan.

Dalam melaksankan tugas pokoknya, Kepala Sub – Bagian keuangan mempunyai beberapa tugas seperti, melakukan penyusunan rencana kerja Sub – Bagian, melakukan persiapan rencana anggran terkait dengan pendanaan kegiatan dalam lingkup dinas, melakukan persiapan yang terkait dengan kredit atau pengeluaran anggaran guna melakukan pembelanjaan baik dari dana APBD atau pun dana APBN, kemudian melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perbendaharaan untuk pendanaan kegiatan kedinasan yang angaranya sudah di tetapkan sebelumnya, melakukan pembayaran gaji

pegawai yang sudah diatur dalam ketentuan tertentu, melakukan pembukuan terkait dengan pendapatan ataupun pengeluaran, menjalakan administrasi berupa pemungutan dana. Pelakukan pelaoran dan menyetorkan pajak, memperisapan data yang terkait dengan kuangan, melakukan perhitungan dan penganggaran pembelanjaan dinas, melakukan penyusunan laporan guna bentuk dari pertanggungjawaban terhadap penggunaan keuangan serta mengawasi administrasi kebendaharaan dalam lingkup dinas, membuat laporan tugas beserta fungsinya, melaksankan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub – Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Sub – Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mendapatkan tugas pokok yakni membantu Sekertaris untuk melaksankan penyiapan bahan guna perumusan kebijakan berserta kegaiatan, beritkut dengan evaluasi dan pelporanya.

Dalam menjalankan tugas pokok, kepala Sub – Bagian Program, Evaluasi dan Pelporan membunya beberapa tugas seperti membuat rencana kerja Sub – Bagian, mempersiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dinas , mempersiapkan bahan rencana anggran belanja dinas yang bersumber dari APBN dan APBD, mempersiapkan bahan untuk kegiatan berserta program, mengumpulkan bahan guna membuat indikator terkait dengan keberhasilan suatu kegiatan ataupun program dalam suatu dinas, memfasilitasi sebuah kegiatan ataupun program yang di buat oleh dinas dari pemerintah pusat baik itu kabupaten ataupun provinsi, mempersiapkan bahan

guna sebagai pentunjuk dalam sebuah pelaksanaan program ataupun kegiatan, mempersiapkan segala bahan guna memberikan dukungan dan membantu penyelenggaraan program ataupun kegiatan, mengelola sekligus melaporkan sebuah pelaksanaan pembangunan yang pembiayaan nya di danai oleh APBN ataupun APBD, mempersiapkan bahan evalaluasi pelaksanaan pembangunan yang dana nya bersumber dari dana APBD dan APBN ke Kabupaten atau Kota, membuat laporan tugas berserta dengan fungsinya, melaksanakan tugas lain tyang sesuai dengan tugas berserta dengan fungsinya

C. Bidang Pembinaan Kebudayaan Daerah

Bidang Pembinaan Kebudayaan Daerah mempunyai tugas pokok yaitu membantu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dalam melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan juga perumusan kebijakan teknis operasional di dalam bidang pembinaan dan kebudayaan daerah (Bantenculturetourism.com, 2019).

Dalam melaksanakan **tugas pokoknya**, Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Derah mempunyai beberapa fungsi seperti berikut, merumuskan kebijakan teknis opersioal dalam bidang nilai dan juga budaya, sejarah dan juga kepurbakalaan berserta kesenian, menyusun pedoman pengaturan standarisasi nilai budaya, sejarah, kepurbakalaan dan juga kesenian, melakukan pembinaan, pengembanhhan dan singkronisasi kegiatan dalam bidang nilai budaya, sejarah, kepurbakalaan dan kesenian, melakukan koordinasi dan singkronisasi kegiatan dalam bidang nilai budaya, sejarah, kepurbakalaan dan kesenian, melaksanakan program dan kegiatan dalam bidang nilai budaya, sejarah, kepurbakalaan dan kesenian, melaksanakan evalusi, supervisi data dan

pelporan kebijkan standarisasi program dan kegiatan dalam bidang nilai budaya, sejarah, kepurbakalaan dan kesenianserta melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya (Bantenculturetourism.com, 2019).

Dalam melaksakan fungsinya, Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Daerah mempunyai beberapa tugas seperti menyusun rencana kerja Bidang, mempersiapkan bahan untuk perumusan kebijakan teknis operasional di dalam bidang niai budaya, sejarah, kepurbakalaan dan kesenian, mempersiapkan bahan pembinaan dan pengembangan dalam bidang nilai budaya, sejarah, kepurbakalaan, dan kesenian, mempersiapkan bahan untuk pengendalian teknis program dalam bidang nilai budaya, sejarah, kepurbakalaan, dan kesenian mempersiapkan bahan untuk perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis program dalam bidang nilai budaya, sejarah, kepurbakalaan, dan kesenian, melakukan koordinasi, integrasi, singkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas, melakukan pembuatan laporan tugas dan juga fungsinya, melakukan tugas lain yang sesui dengan tugas dan juga fungsinya (Bantenculturetourism.com, 2019).